

**GOVERNMENT RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (GRMS):
INOVASI LAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Eva Hany Fanida dan Fitrotun Niswah¹

Abstract

Implementation of e-Government, in fact facilitates the relationships between government, private, and the community, making them more efficient, effective, and productive. The ease of governance relationships through e-Government was responded well by the Surabaya City Government in order to improve services to the government, the private sector and the public. To improve its services, city officials adopted the ERP (Enterprise Resource Planning), a kind of software that integrates all departments and functions of a company or into a computer system that can serve all the needs of the company, either from the sales department, HR, production or finance. The objective of the ERP system is to coordinate the organization's overall business.

The Surabaya City Government has implemented the ERP software with the name of Government Resources Management System (GRMS). The GRMS is one of the innovations developed as a resource management system that is integrated with the administration of bureaucratic activity from upstream to downstream (in the context of spending) that has been developed by the government of Surabaya in order to support local financial management. The implementation of GRMS is expected to increase transparency and accountability in government procurement, information on the state or condition of physical progress of a work and its problems, and facilitate the acknowledgement and accumulation of expenditures for each activity in the construction and implementation of activities or tasks in accordance with schedule which have been implemented. So that the desired output to meet the challenges and demands of better public services.

Key Words: *e-Government, Enterprise Resources Planning (ERP), Government Resources Management System (GRMS), Surabaya City Government*

¹ Staf Pengajar di Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya (efanida@yahoo.com dan vita.unesa@yahoo.com)

Pendahuluan

Pengembangan *electronic government* bukan sebuah upaya yang sekali jadi, namun diperlukan serangkaian tahapan yang sistematis, terukur dan berkesinambungan dengan dukungan dari seluruh komponen baik dari pemerintah, sektor swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dalam penerapannya. Hubungan implementasi konsep *e-Government* yang berhubungan dengan penerapan GCG yang menunjukkan bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibutuhkan kecepatan proses kerja serta otomatisasi administrasi dan modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga melalui implementasi *e-Government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik. Dengan adanya implementasi *e-Government*, hubungan-hubungan tata-pemerintahan (*governance*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif.

Senada dengan konsep tersebut, kemudahan hubungan tata-pemerintahan melalui *e-Government* direspon dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki layanan kepada pemerintah, swasta dan masyarakat pada khususnya, Pemerintah Kota Surabaya mengadopsi ERP (*Enterprise Resource Planning*), salah satu *software* yang diminati perusahaan di Indonesia saat ini². ERP merupakan *software* yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi atau keuangan. Tujuan dari sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan³. Adapun manfaat yang utama dari sistem ERP ini adalah menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Poernomo, 2011).

Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan *software* ERP ini menjadi sebuah program *Government Resources Management System* (GRMS). GRMS didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah (dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2010). *Government Resources Management System* sendiri memiliki beberapa tujuan⁴. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan diterapkannya GRMS, pengadaan barang yang dilakukan pemerintah dapat diketahui sebenar-benarnya tanpa ada *mark-up* data dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memudahkan informasi atas keadaan atau kondisi perkembangan pelaksanaan fisik pekerjaan dan permasalahannya. Ketiga, memudahkan mengetahui akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang dalam pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan.

Idealnya manfaat dan tujuan *Government Resources Management System* tersebut menjadi pemicu Pemerintah Kota Surabaya untuk menjawab tuntutan untuk selalu

² <http://software.infogoe.com>, diakses 23 Februari 2013

³ <http://en.wikipedia.org>, diakses 23 Februari 2013

⁴ Dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2010

memberikan pelayanan yang terbaik dan melayani masyarakat secara efektif, efisien, mudah, hemat biaya, transparan dan penuh bertanggung jawab.

Pembahasan

Government Resources Management System (GRMS) adalah sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah (dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2005). *GRMS* dibangun oleh Pemkot Surabaya bekerjasama dengan ITS (Institut Teknologi Surabaya) dan sudah dipatenkan oleh Pemkot Surabaya pada Ditjen HAKI pada tahun 2007.

Selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan program *Government Resources Management System* menggunakan strategi *SWOT Analysis* dengan hasil sebagai berikut:

- a. *Strength* (Kekuatan) Mempunyai infrastruktur jaringan internet, server (Web, Mail, Proxy, Data), kelembagaan yang mantap serta dukungan pimpinan yang kuat.
- b. *Weakness* (Kelemahan) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terklarifikasi dan terkuualifikasi untuk dapat menjalankan, memelihara dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi.
- c. *Opportunity* (Peluang) Teknologi informasi sebagai infrastruktur kemajuan dapat memberikan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. *Threat* (Ancaman) Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan perangkat hukum untuk ICT masih belum memadai.

Dengan mengetahui strategi implementasinya, Bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya sebagai operator program *Government Resources Management System* menjalankan metode implementasi sebagai berikut:

- a. Implementasi dilakukan bertahap dari yang paling dasar dan terkait hajat SKPD. Pada awalnya dijalankan *e-Budgeting* dan *e-Procurement* terlebih dahulu baru kemudian dikembangkan empat segmen *Government Resources Management System* yang lain.
- b. Melengkapi semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada rantai manajemen keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa, sehingga semua pihak dapat merasakan kemudahan dan manfaat *Government Resources Management System*.
- c. Menggunakan Instruksi Walikota dan Peraturan Walikota sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan program *Government Resources Management System*.
- d. Menstandarkan prosedur administrasi dan teknis untuk keamanan informasi dengan ISO 27001:ISMS
- e. Melakukan langkah persuasif pada komponen kunci birokrasi yang masih resisten dan memberikan pelatihan untuk semakin meningkatkan efektifitas pelaksanaan *Government Resources Management System*.
- f. Memberikan *reward* (apresiasi) kepada segenap pihak yang melaksanakan implementasi *Government Resources Management System* dengan baik.

Government Resources Management System memiliki enam segmen yang memiliki kegiatan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, antara lain:

- a. **E-Budgeting** adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. *e-Budgeting* bermula ketika Pemerintah Kota Surabaya menyadari bahwa penyusunan anggaran yang lama, harga satuan item belanja tidak terstandar sehingga sangat mungkin terjadi penyelewengan, dan kenyataan bahwa Tim Anggaran Eksekutif kesulitan mengendalikan rapat dan tidak hapal rincian usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlebih SKPD yang tidak menghadiri rapat. Maksud dan tujuannya adalah memudahkan Tim Anggaran Eksekutif dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), keakuratan nilai dan rekening serta akuntabilitas alokasi belanja. Sistem ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Proses yang transparan,
2. Proses penyesuaian singkat dan tepat waktu,
3. Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan,
4. Kronologis anggaran jelas,
5. *Report* sesuai permintaan Ketua Tim Anggaran dapat terpenuhi.

Gambar 1
Interface Program e-Budgeting



Sumber: budgeting.surabaya2excellence.or.id

Sistem *e-Budgeting* seperti program *e-Government* yang lain, memiliki keunggulan dalam hal efektivitas pekerjaan dan efisiensi biaya karena pekerjaan yang banyak dapat diselesaikan oleh sedikit orang dalam waktu yang cepat dan budaya *paperless* dalam *e-Budgeting* membuat Pemerintah Kota Surabaya tidak perlu menyediakan banyak kertas bagi seluruh SKPD untuk mengisi *form* sehingga terjadi efisiensi biaya dalam pelaksanaannya. *E-Budgeting* dalam pengimplementasiannya melibatkan beberapa *user* yang dapat mengaksesnya antara lain:

- 1) Administrator
Administrator berhak untuk melakukan Manajemen *user*, Manajemen *database* dan semua hak *user* lainnya seperti:
 - a) Mengunci dan membuka akses *user*
 - b) Mengunci kegiatan yang diusulkan
 - c) *Back-up* data usulan

- d) Masuk ke *user* dalam rangka memfasilitasi kebutuhan *user* atas izinnya.
- 2) Tim Data
Tim data berhak untuk melakukan Manajemen Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Estimasi Harga Satuan yang diperlukan atas seizin pimpinan seperti:
 - a) Memasukkan Standar Harga Satuan Dasar (SHSD)
 - b) *Lock* komponen
 - c) Membuat estimasi harga
 - d) Membuat HSPK dan ASB
- 3) Tim Anggaran Eksekutif
Tim Anggaran berhak melakukan pengecekan dan perubahan kegiatan pelayanan, diantaranya:
 - a) Mengedit Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b) Merasionalisasikan dan menyesuaikan komponen terhadap bentuk kegiatan
 - c) Mengunci kegiatan yang sudah sesuai
- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD memiliki hak untuk membuat pengajuan usulan kegiatan pelayanan, diantaranya:
 - a) Mengajukan usulan RKA dengan harga yang sesuai dengan SHSD
 - b) Memasukkan usulan ke internet
 - c) Mengisi output dari kegiatan yang diajukan.
- 5) Panitia Anggaran Legislatif
Berhak untuk melihat usulan kegiatan pelayanan dan laporan-laporan rekapitulasi.
- 6) Umum/Masyarakat
Pemerintah Kota Surabaya sedang merumuskan format informasinya agar tidak kontra produktif.

Gambar 2
Interface Login Menu e-Budgeting
Sumber: Data Pemkot Surabaya, 2013



- b. ***E-Project Planning*** adalah sistem perencanaan kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pencatatan rincian rencana kegiatan yang ditetapkan berdasarkan faktor waktu, alokasi anggaran, dan volume kegiatan. Program ini dibuat dengan latar belakang kebutuhan sistem penyerapan pekerjaan SKPD yang terintegrasi dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), pengalokasian pelaksanaan anggaran ke dalam paket-paket pekerjaan dan kebutuhan akan informasi pelaksanaan anggaran kegiatan secara triwulan yang tertuang dalam DPA. Adapun tujuan pembuatan program *e-Project Planning* adalah:

- 1) Menyediakan sistem untuk perencanaan pelaksanaan anggaran secara terintegrasi
- 2) Data input otomatis dari *e-Budgeting*
- 3) Meminimalisasi tingkat kesalahan
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
- 5) Mengalokasikan anggaran ke dalam paket-paket pekerjaan
- 6) Merencanakan pelaksanaan anggaran kegiatan selama satu tahun anggaran
- 7) Menyediakan data pelaksanaan anggaran kegiatan secara triwulan
- 8) Menyediakan dokumen pendukung dalam kontrak kinerja

Pemaketan pekerjaan dalam *e-Project Planning* diklasifikasikan dalam tiga bagian, antara lain:

- 1) Berdasarkan Sub Kegiatan
Pemaketan pekerjaan didasarkan kepada setiap satu sub kegiatan setidaknya minimal harus memiliki satu paket pekerjaan.
 - 2) Berdasarkan Metode Pengadaan Barang/Jasa
 - a) Swakelola (pembayaran langsung, pembelian langsung, dll)
 - b) Pengadaan langsung
 - c) Lelang
 - 3) Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Pemaketan pekerjaan terkait dengan bentuk dokumen kontrak pekerjaan/Surat Perintah Kerja (SPK).
- c. ***E-Procurement*** adalah sistem lelang sebuah proyek yang dilakukan melalui internet.
Proses pelaksanaan pelelangan umum melalui *e-Procurement* dimulai dari Unit Kerja/SKPD memasukkan paket kerja yang akan dilelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian ULP mengundang SKPD tersebut beserta Gugus Tugas Pelelangan (GTP) yang telah ditunjuk untuk membahas dokumen pengadaan pekerjaan yang akan dilelang untuk kemudian data dari GTP dan dokumen pengadaan pekerjaan yang akan dilelang tersebut dimasukkan ke portal *e-Procurement* oleh ULP. Data yang dimasukkan kemudian dicek oleh Sekretariat *e-Procurement* sebelum disetujui oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dapat di *download* dokumen lelang dan tawar menawar oleh pihak penyedia barang/jasa yang telah teregistrasi. Selanjutnya, GTP memproses pelelangan paket sampai usulan calon pemenang kepada PPK untuk dimasukkan ke dalam portal *e-Procurement* data pemenang dari lelang paket pekerjaan tersebut. Kemudian PPK

membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berikut juga membuat kontrak pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.

- d. **E-Delivery** adalah Sistem Pendukung Administrasi Kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan.
- e. **E-Controlling** adalah salah satu bagian dari skenario besar *e-Government* di Pemerintah Kota Surabaya, melalui konsep GRMS (*Government Resource Management System*). Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di *e-Project Planning* dengan hasil pekerjaan yang diinput melalui sistem *e-Delivery*.
- f. **E-Performance** adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 86 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa efektivitas organisasi dipandang lebih menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapainya terukur derajat atau tingkat pencapaian tujuan, apakah pelaksanaan suatu organisasi telah berhasil mencapai sasaran atau tujuan, atau dengan kata lain apakah suatu organisasi itu produktif dengan “mengerjakan sesuatu yang benar”. Pernyataan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa dengan adanya program GRMS (*Government Resource Management System*) menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Surabaya secara kontinyu untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Tuntutan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan melayani masyarakat secara efektif, efisien, mudah, hemat biaya, transparan dan penuh bertanggung jawab dituangkan Pemerintah Kota Surabaya dalam Program *Government Resources Management System* yang mana program tersebut memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Biaya yang dikeluarkan terstandar dengan baik
- b. Detail rencana diketahui antar lini di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
- c. Pengendalian terhadap pengeluaran kuat
- d. Adanya akurasi kontrak pengadaan barang/jasa
- e. Transparansi data
- f. Motivasi kerja yang tinggi

Keenam manfaat tersebut harus disertai dengan adanya kerjasama dan sinergi berbagai pihak terutama bagi Kepala bagian juga harus mampu untuk mengelola pengaruh *stakeholder* ini untuk semakin memperbaiki penerapan program *Government Resources Management System* dengan menerapkan cara atau langkah sebagai berikut:

- a. Mengartikulasikan visi dan misi *Government Resources Management System* dalam penerapan program yang dapat dimengerti dengan jelas dan baik oleh *stakeholder*
- b. Menyusun perencanaan program yang matang dan menyeluruh sehingga mudah dimengerti
- c. Melakukan lobi dan negosiasi dengan *stakeholder* sehingga tidak ada benturan kepentingan dalam penerapan program *Government Resources Management System*.

Dengan langkah tersebut diharapkan program *Government Resources Management System* ini diselenggarakan dan diterapkan dengan dukungan seluruh pihak yang terlibat sehingga program ini dapat berkembang dan seluruh kegiatan belanja yang dilakukan oleh seluruh bagian di Pemerintah Kota Surabaya lebih terstandar dan lebih dapat dikontrol dan selanjutnya inovasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan ini akan berdampak atau memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan dan peningkatan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Bina Program Pemkot Surabaya. 2005.----- . 2010.

<http://budgeting.surabaya2excellence.or.id>

<http://software.infogate.com>

Poernomo, Yoeda Hari. 2011. E-Business: Enterprise Resource Planning (ERP) (online)

Peraturan Walikota No.23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No.86 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

